

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2015 – 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan | 45 Perkara | 45 Perkara | 45 Perkara | 50 Perkara | 50 Perkara |
| | | Jumlah sisa perkara yang diselesaikan | 25 Perkara | 25 Perkara | 25 Perkara | 30 Perkara | 30 Perkara |
| 2. | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis | 45 Perkara | 45 Perkara | 45 Perkara | 50 Perkara | 50 Perkara |
| | | Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 35 Perkara | 35 Perkara | 35 Perkara | 40 Perkara | 40 Perkara |
| | | Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu | 250 Perkara | 250 Perkara | 250 Perkara | 250 Perkara | 250 Perkara |
| | | Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak | 35 Perkara | 35 Perkara | 40 Perkara | 40 Perkara | 40 Perkara |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Jumlah eksekusi tepat waktu | 5 Perkara | 5 Perkara | 5 Perkara | 5 Perkara | 5 Perkara |
| 3. | Peningkatan Kualitas SDM | Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 3 orang | 3 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang |
| | | Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial | 2 orang | 3 orang | 3 orang | 3 orang | 3 orang |
| 4. | Peningkatan Kualitas Pengawasan | Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Prosentase temuan yang ditindak lanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntansi pemerintah (SAP) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Optimalnya penyerapan anggaran | 96 % | 96 % | 97,5 % | 97,5 % | 98 % |
| 7. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 8. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN | 5 Perkara | 5 Perkara | 5 Perkara | 10 Perkara | 5 Perkara |

Samarinda, Januari 2014

KETUA,



Wenceslaus
WENCESLAUS, S.H. M.H.
NIP.19610928 198603 1 002

Penjelasan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2015 – 2019

Laporan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana telah ditetapkan dan disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lima tahun yaitu 2010-2014 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan dan langkah- langkah program kerja pada lima tahun berikutnya 2015 - 2019 dengan harapan dapat di peroleh hasil kinerja yang lebih baik. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun 2010 - 2014 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan hal -hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas seperti peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Penyusunan Rencana Strategis ini untuk mengetahui program kurun waktu 5 Tahun dan juga untuk memenuhi maksud instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo SE MENPAN No. SE-31/m.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja. Selain itu sebagai Laporan Pelaksanaan Tugas/Pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam tahun 2015-2019 terhadap berbagai permasalahan dan langkah - langkah pemecahannya. Adapun *dasar hukumnya* adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. PP nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga;
6. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.